

ABSTRACT

The construction of toll roads in Indonesia, under President Joko Widodo, aims to improve the economy, distribution efficiency, and equitable development. The National Strategic Project (PSN) in the 2020-2024 RPJMN focuses on economic growth and community welfare. One of them is the Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road, which requires land acquisition in accordance with Law No. 2 of 2012 with fair compensation.

This study uses a qualitative approach of case studies, with primary and secondary data collected through interviews and observations. This study produces research that the land acquisition process faces social, economic, and political obstacles, especially dissatisfaction with compensation. Land acquisition forces farmers to switch to the non-agricultural sector and damages access to roads and waterways. People use indemnity to buy new land, distribute it to heirs, or for business capital and savings, while some buy private vehicles.

This study concludes that it is important for the expropriator to provide a fair value of compensation, pay attention to social and economic aspects, and maintain transparency and sensitivity to the emotional value of the land. Policies that support a just economic transition are needed to prevent further social and economic disparities.

Keywords: Toll Road Construction, Land Acquisition, Compensation

Pembangunan jalan tol di Indonesia, di bawah Presiden Joko Widodo, bertujuan meningkatkan perekonomian, efisiensi distribusi, dan pemerataan pembangunan. Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2020-2024 fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo, yang memerlukan pengadaan tanah sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dengan ganti rugi yang adil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Studi ini mengasilkan penelitian bahwa proses pengadaan tanah menghadapi hambatan sosial, ekonomi, dan politik, terutama ketidakpuasan terhadap ganti rugi. Pembebasan lahan memaksa petani beralih ke sektor non-pertanian dan merusak akses jalan serta saluran air. Masyarakat menggunakan ganti rugi untuk membeli tanah baru, membagikannya kepada ahli waris, atau untuk modal usaha dan tabungan, sementara sebagian membeli kendaraan pribadi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting bagi pihak pengambil alih untuk memberikan nilai ganti rugi yang adil, memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, serta menjaga transparansi dan sensitivitas terhadap nilai emosional tanah. Kebijakan yang mendukung transisi ekonomi yang adil diperlukan untuk mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi lebih lanjut.

Kata Kunci: Pembangunan Jalan Tol, Pembebasan Lahan, Ganti Rugi